

ABSTRAK

KONTRIBUSI ANALISIS PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI TENAGA AHLI KONSTRUKSI (INSINYUR) TERHADAP PENGEMBANGAN REGULASI KEINSINYURAN DI INDONESIA

Oleh

Irika Widiyanti

NIM: 35011010

Program Studi Doktor Teknik Sipil

Proses konstruksi secara umum terdiri atas beberapa tahap, yang dimulai dari konseptual disain, perancangan dan perencanaan disain, pelelangan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan dan pemeliharaan. Setiap tahapnya, memerlukan perencanaan untuk dapat menghasilkan produk dengan kualitas sesuai spesifikasinya. Tahap awal proses konstruksi memberikan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas fasilitas terbangun. Pada tahap awal proses konstruksi yaitu tahap disain (konseptual, perancangan dan perencanaan disain), konsultan merupakan pihak yang berperan paling besar. Konsultan memberikan jasa layanan profesional dengan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brain ware*). Layanan profesional tersebut terutama diberikan oleh tenaga ahli. Salah satu upaya peningkatan kualitas kompetensi dan profesionalisme tenaga ahli adalah sertifikasi. Dalam penelitian ini, Terdapat tiga sistem sertifikasi tenaga ahli konstruksi (STAK) di Indonesia yaitu sistem STAK 2000, STAK 2010, dan STAK 2014. Sistem STAK 2000 berdasarkan Peraturan Pemerintah 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, STAK 2010 berdasarkan Peraturan Pemerintah 04 tahun 2010 tentang perubahan atas PP 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dan STAK 2014 berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran. Pada UU 11/2014, tenaga ahli yang profesional disebut sebagai insinyur.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai sertifikasi tenaga ahli konstruksi (STAK) di Indonesia menunjukkan bahwa sertifikasi yang seharusnya memberikan jaminan bagi pengguna jasa untuk yakin dengan kompetensi tenaga ahli, pada praktiknya sebagian hanya bersifat administrasi untuk memenuhi persyaratan mengikuti pelelangan. Tidak ada jaminan mutu bahwa pemegang sertifikat memiliki kompetensi sesuai dengan sertifikat yang dimilikinya. Pelaksanaan dan pengawasan akreditasi Badan Sertifikasi Keahlian (BSA) asosiasi profesi sebagai penyelenggara sertifikasi, tidak berlangsung secara transparan dan akuntabel. Kondisi ini menimbulkan pemikiran untuk mengevaluasi secara komprehensif terhadap sistem STAK yang sudah berjalan yaitu STAK 2000 dan 2010, terkait dengan permasalahan karakteristik, pelaksanaan, dan luarannya.

Sistem STAK ke depan akan diatur oleh UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. STAK 2014 ini masih berupa konsep, belum memiliki peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan masukan akademis bagi penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan STAK 2014. Sebagai langkah awal, dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan STAK 2000 dan 2010, serta konsep STAK 2014. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaiannya STAK tersebut dengan prinsip STAK yang ideal. Evaluasi dilakukan dengan menyusun model evaluasi sistem STAK. Rancangan model ini disusun dengan menggunakan prinsip *good governance* yang disintesiskan dengan konsep sertifikasi pada bidang teknik sipil menurut penelitian terdahulu pada negara-negara lain. Selanjutnya rancangan model evaluasi sistem STAK ini, dikembangkan melalui proses *desk evaluation* terhadap sistem STAK di Malaysia, Singapura, dan Filipina. Proses ini menghasilkan variabel dan faktor dari *best practices of certification* yang sekaligus merupakan model evaluasi sistem STAK.

Pada tahap evaluasi terhadap sistem STAK, diketahui terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan *best practices of certification*, terutama pada variabel proses bisnis. Faktor-faktor yang masih tidak sesuai pada sistem STAK 2014 divalidasi kepada stakeholder dengan metode *face validity*, yaitu menguji hasil evaluasi dengan melakukan wawancara kepada responden. Responden dibagi menjadi beberapa kelompok dengan menganut konsep triangulasi, sehingga dapat memperlihatkan bukti berdasarkan lintas data. Penentuan kelompok responden didasarkan pada konsep *good governance* sesuai dengan konsep sertifikasi pada penelitian ini yang berdasarkan *good governance*. Kelompok responden terdiri atas pemerintah, masyarakat, penyedia jasa dan pengguna jasa. Hasil validasi menunjukkan bahwa responden lebih memilih ke arah *best practices*. Ini artinya, masih ada hal-hal yang harus disempurnakan dari sistem STAK 2014. Arah penyempurnaan dari sistem STAK 2014 dirumuskan dengan penyusunan masukan akademis untuk penyelenggaraan sertifikasi tenaga ahli konstruksi (Insinyur) berdasarkan UU 11/2014 tentang Keinsinyuran.

Penelitian ini menghasilkan kontribusi ilmiah yaitu masukan akademis bagi pengembangan regulasi keinsinyuran di Indonesia khususnya untuk penyelenggaraan sertifikasi Insinyur. Masukan akademis ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam penyusunan peraturan pelaksana UU 11/2014 tentang Keinsinyuran khususnya terkait penyelenggaraan sertifikasi insinyur. Sementara itu, kontribusi empiris penelitian ini adalah model evaluasi sistem sertifikasi tenaga ahli konstruksi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam mengevaluasi sertifikasi tenaga ahli (Insinyur) pada bidang selain konstruksi yang masuk dalam lingkup pengaturan UU 11/2014 tentang Keinsinyuran.

Kata kunci: sertifikasi tenaga ahli konstruksi

Total kata: 636

ABSTRACT

THE CONTRIBUTION OF ANALYSIS IN PROFESSIONAL ENGINEER CERTIFICATION TO THE DEVELOPMENT OF ENGINEERING REGULATION IN INDONESIA

Irika Widiyanti

NIM: 35011010

Doctoral Program in Civil Engineering

The construction process, in generally, consists of several stages, starting from conceptual design, design and planning, bidding, construction, utilization and maintenance. Each stage requires planning to produce products of the highest quality according to their specifications. The initial phase of the construction process provides an enormous opportunity to improve the quality of facilities. In the early stages of the construction process namely the design stage, the consultant plays the greatest role. Consultants provide professional services with specific expertise in various fields of science that prioritize the brainware. These professional services are mainly provided by engineers. One effort to improve the quality of competence and professionalism of engineer is certification. In this research, the civil engineer certification (STAK) in Indonesia is divided into 3 periods, namely period 1, based on Government Regulation No. 28, 2000 on Business and Role of Construction Services Society, hereinafter referred to as STAK 2000. Period 2 is civil engineer certification based on Government Regulation No. 04, 2010 on the amendment to GR No. 28, 2000 concerning Business and Role of Construction Service Society, hereinafter referred to as STAK 2010. The next period is civil engineer certification based on Decree No. 11, 2014 regarding engineering, hereinafter referred to as STAK 2014.

Previous studies on the civil engineer certification in Indonesia suggest that certification that is should provide assurance for service users to be confident in the competence of engineers, in practice partially only administrative to meet the requirements of bidding. There is no quality assurance that the certificate holder has a competent in accordance with the certificate he holds. Implementation and supervision of accreditation for Certification Board from the professional association as a certification provider does not take place transparently and accountably. This condition raises the idea to comprehensively evaluate the existing STAK system, which is STAK 2000 and 2010, related to the characteristic, implementation, and outcome.

For the future, STAK system will be governed by Decree No. 11, 2014 on Engineering. STAK 2014 is still a concept, not yet have rules of implementation. This research aims to formulate the academic input for the preparation of the implementation rules of the implementation of STAK 2014. As a first step, arrangement of the evaluation model for certification of construction engineer. The design of the evaluation model for professionals certification, developed through a desk evaluation process of the professional certification in Malaysia, Singapore,

and the Philippines. Furthermore, evaluated of the implementation of STAK 2000 and 2010, and the concept of STAK 2014, to know the suitability of the each period STAK with the best practices of certification. Factors that are not suitable, validated to stakeholders with face validity method. Validation results indicate that respondents lead to best practices of certification. This means that there are still things to be refined from the 2014 STAK system. The direction of refinement of the 2014 STAK system is formulated by the preparation of academic inputs for the professionals' certification based on Decree No 11, 2014 on Engineering.

This research provides a scientific contribution that is academic input to the organization of certification of construction engineer. This academic input can be used as a reference in the drafting of implementing regulations of Decree 11, 2014 on Engineering, particularly related to the implementation of professional certification. Meanwhile, the empirical contribution of this research is the evaluation model of the professional certification. This model can be used as a reference in evaluating the certification of Engineers in a field other than the construction that falls within the scope of regulation of Decree 11, 2014 on Engineering.

Keywords: *professional certification, evaluation model*

Total words: *591*